

# LAPORAN

## PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

TRIWULAN II  
2023



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA  
Jl. Veteran No. 139 Purwakarta



0264-8224794



[dpmtsp.purwakartakab.go.id](http://dpmtsp.purwakartakab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt., karena dengan rahmat dan ridha-Nya, Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Triwulan II Tahun 2023 dapat diselesaikan. Kegiatan pengawasan pelaksanaan penanaman modal merupakan upaya memastikan pelaksanaan kegiatan usaha, perkembangan realisasi penanaman modal dan/atau pelaksanaan kewajiban kemitraan yang dilaksanakan terhadap kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan pelaku usaha, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kami harapkan laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan oleh para pemangku kepentingan urusan penanaman modal, yang pada akhirnya berimplikasi positif terhadap perkembangan investasi, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat Kabupaten Purwakarta. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, atas kontribusinya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun kami butuhkan demi kesempurnaan laporan ini. Semoga Allah swt. senantiasa melimpahkan ridha-Nya dan menerangi setiap langkah kita.

Purwakarta, 5 Juli 2023

KETUA TIM PENGAWASAN PELAKSANAAN  
PENANAMAN MODAL  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA



**KUNTO ADJIE WIBOWO, S.P., M.Tr. AP.**

NIP. 19861118 200501 1 002

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha. Pelaksanaan pengawasan di daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta melaksanakan pengawasan terhadap pelaku usaha yang kewenangan pengawasannya berada pada pemerintah daerah kabupaten, dan sudah memiliki perizinan berusaha berbasis risiko. Sedangkan bagi pelaku usaha yang belum memiliki perizinan berusaha, kewenangan pengawasannya masih melekat pada instansi teknis pembinaanya. Tujuan pengawasan antara lain :

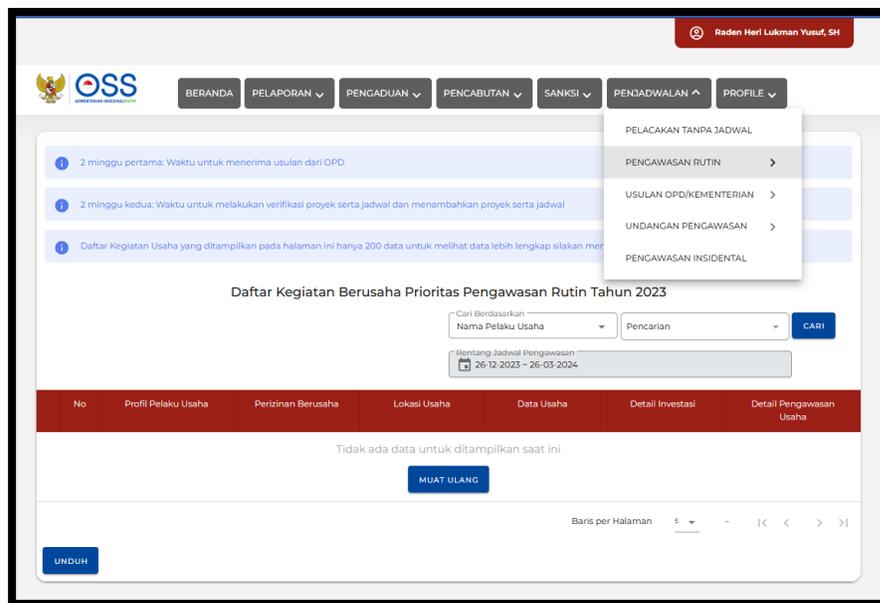
1. Memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh pelaku usaha;
2. Mengumpulkan data, bukti, laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup;
3. Rujukan pembinaan atau penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran perizinan berusaha.



Gambar 1. Level Kewenangan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pengawasan terdiri dari pengawasan rutin dan pengawasan insidental. Pengawasan rutin terdiri dari inspeksi lapangan dan pelaporan pelaku usaha melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Sedangkan pengawasan insidental dilaksanakan berdasarkan adanya pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha.

Pengawasan dilaksanakan secara terintegrasi melalui Subsistem Pengawasan pada sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). Subsistem pengawasan dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha, Lembaga OSS, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.



Gambar 2. Subsistem Pengawasan pada OSS RBA

## 1.2. SUMBER DAYA

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan. Sejalan dengan teori tersebut, dalam mendukung kinerja pelaksanaan pengawasan pelaksanaan penanaman modal Tahun 2023, diperlukan sumber daya pendukung yang terdiri dari sumber daya manusia, anggaran, peralatan dan kewenangan.

### a. Sumber Daya Manusia

Pelaksana pengawasan tertuang dalam Surat Perintah Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Nomor KPG.11.01/260-SEKRET/2023 Tanggal 17 Maret 2023 tentang Penugasan Tim Kerja di Lingkungan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta. Tim Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari 11 (sebelas) personil sebagai berikut :

Tabel 1. Susunan Tim Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

No.	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Tim Pengawasan
1	Kunto Adjie Wibowo, S.P., M.Tr.AP.	Penata Kelola PM Ahli Muda	Ketua
2	R. Heri Lukman Yusup, S.H.	Penata Kelola PM Ahli Muda	Anggota
3	Lingga Kencana, S.Pd.	Penata Perizinan Ahli Muda	Anggota
4	Dewi Susanti, SKM., MKM.	Pengawas Perizinan	Anggota
5	Ahmad Soleh, S.E.	Pengawas Perizinan	Anggota
6	Edwin Danil Farid	Pengelola Pengawasan	Anggota
7	Octiviani Ruhyanto, S.ST., M.Tr.AP.	Penata Perizinan Ahli Muda	Anggota
8	Hj. Eneng Euis Komariah, S.Pd., M.Si.	Penata Kelola PM Ahli Madya	Anggota
9	Hj. Ratu Alidah Suwarni, S.Sos.	Penata Kelola PM Ahli Muda	Anggota
10	Yoga Septian Pratama	Petugas PTSP	Anggota
11	Sansabilla Arifa Azzahra, S.M.	Petugas PTSP	Anggota

**b. Anggaran**

Pelaksana pengawasan didukung oleh anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal dari Kementerian Investasi / BKPM RI. Implementasi anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Investasi / Kepala BKPM RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal, dirincikan sebagai berikut :

Program	: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Kegiatan	: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Sumber	: Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Jumlah	: Rp. 66.000.000,-
	Belanja Barang Pakai Habis : Rp. 17.780.000,-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Rp. 48.220.000,-

**c. Peralatan**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal didukung oleh sarana sebagai berikut:

Komputer	: 5 (lima) unit
Laptop	: 2 (dua) unit
Printer	: 3 (tiga) unit
Mobil Operasional	: 1 (satu) unit

**d. Kewenangan**

Kewenangan ekuivalen terhadap tugas dan tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab Ketua dan Anggota Tim Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal tertuang dalam Surat Perintah Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Nomor KPG.11.01/260-SEKRET/2023 Tanggal 17 Maret 2023 tentang Penugasan Tim Kerja di Lingkungan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta.

Tugas dan tanggung jawab Ketua Tim antara lain :

- a. Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan;
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
- d. Memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;
- e. Melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- f. Melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar anggota tim;
- g. Dalam hal Ketua Tim tidak dapat melaksanakan tugasnya dikarenakan kendala yang sifatnya teknis dan tidak terkait dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan kode etik (cuti besar, cuti sakit, mutasi, promosi, dll) Ketua Tim dapat mengajukan pengunduran diri sebagai Ketua Tim kepada Kepala DPMPTSP.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab Anggota antara lain :

- a. Menyusun rencana kerja individu;
- b. Melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi ketua tim;
- c. Melaporkan hasil kerjanya kepada ketua tim.
- d. Dalam hal Anggota Tim tidak dapat melaksanakan tugasnya dikarenakan kendala yang sifatnya teknis dan tidak terkait dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan kode etik, (cuti besar, cuti sakit, mutasi, promosi, dll) anggota tim dapat mengajukan pengunduran diri dari Tim melalui ketua Tim kepada Kepala DPMPTSP.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PENGAWASAN**

#### **2.1. PELAKSANAAN INSPEKSI LAPANGAN**

Inspeksi lapangan merupakan bentuk pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi dengan pelaksanaan kegiatan usaha. Untuk risiko rendah dan menengah rendah, dilaksanakan sekali dalam setahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal Pelaku Usaha patuh, inspeksi lapangan dapat tidak dilakukan. Sedangkan untuk risiko menengah tinggi dan tinggi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal Pelaku Usaha patuh, inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam setahun untuk setiap lokasi usaha.

Pelaksanaan inspeksi lapangan dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanaman modal dapat berbentuk :

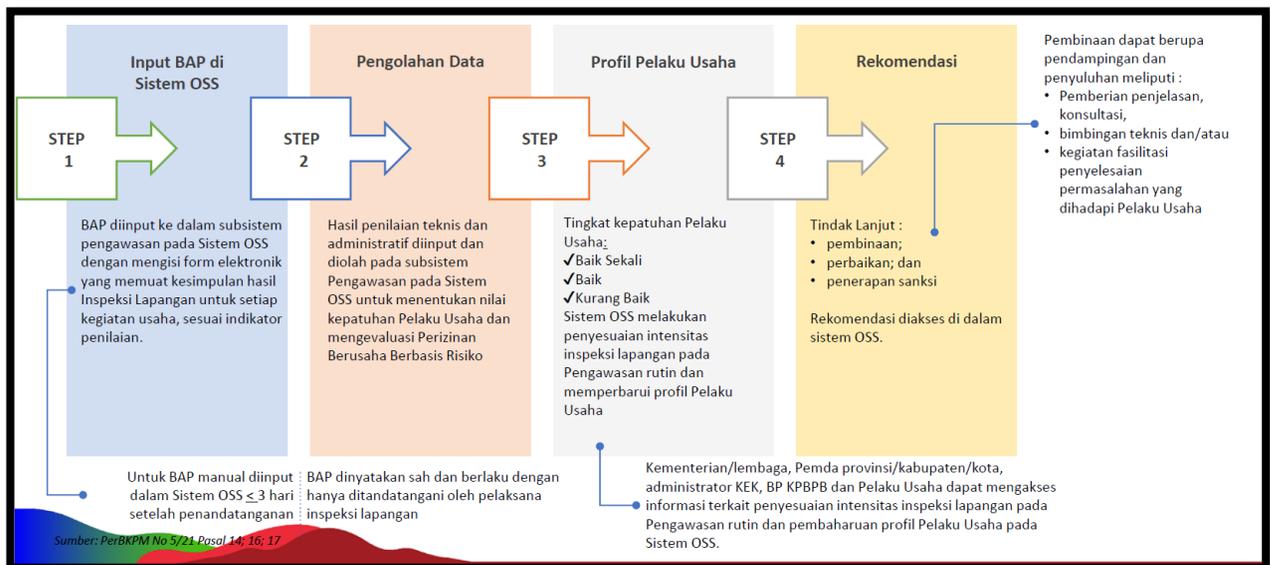
1. Pembinaan berupa pendampingan dan penyuluhan yang meliputi kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha, pemberian penjelasan dan/atau konsultasi; dan/atau
2. Pemeriksaan administratif dan fisik yang meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.

Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, inspeksi lapangan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut :

1. Ketua Tim Pengawasan membuat jadwal inspeksi lapangan rutin dalam sistem OSS berdasarkan usulan dari kementerian/lembaga. Ketua Tim menyusun kompilasi berdasarkan daftar pelaku usaha dalam tahap persiapan, tahap operasional dan/atau tahap komersial. Ketua Tim menyusun rencana inspeksi lapangan tahunan ke dalam Subsistem Pengawasan pada OSS RBA dengan rincian :
  - a. Nama pelaku usaha;
  - b. Lokasi proyek;
  - c. Realisasi penanaman modal;
  - d. Pemanfaatan fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal.
2. Surat tugas diinput oleh pelaksana inspeksi lapangan ke dalam sistem OSS paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi lapangan.

3. Surat pemberitahuan kunjungan akan diterbitkan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh sistem OSS paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi lapangan.
4. Khusus inspeksi lapangan insidental, kegiatan dilakukan sewaktu-waktu dan dapat tanpa pemberitahuan kepada Pelaku Usaha terlebih dahulu.
5. Pada saat pelaksanaan, pelaksana inspeksi lapangan memberikan daftar pertanyaan kepada Pelaku Usaha. Daftar pertanyaan memuat :
  - a. Standar pelaksanaan kegiatan usaha.
  - b. Kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur dan kriteria.
  - c. Kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan fasilitas penanaman modal.
6. Pelaksana inspeksi lapangan membuat BAP berdasarkan data dan informasi yang diperoleh saat pelaksanaan inspeksi lapangan. Pengisian dan penandatanganan BAP oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha di lokasi proyek diinput ke dalam Subsistem Pengawasan pada Sistem OSS RBA.
7. Dalam hal inspeksi lapangan tidak bisa dilakukan dengan kunjungan fisik, inspeksi lapangan dapat dilakukan secara virtual.

Setelah inspeksi lapangan dilaksanakan dilakukan penilaian hasil pengawasan dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan berbagi data (*data sharing*). Secara singkat proses penilaian hasil pengawasan dijelaskan pada gambar berikut :



Gambar 3. Penilaian Hasil Pengawasan

## 2.2. HASIL PENGAWASAN

Pada tahun 2023 target pengawasan yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi/BKPM RI adalah 16 kegiatan usaha sedangkan target pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah 80 kegiatan usaha. Pada Triwulan II (April-Juni) Tahun 2023 telah dilaksanakan pengawasan pelaksanaan penanaman modal terhadap 9 (sembilan) pelaku usaha di wilayah Kabupaten Purwakarta, sehingga sampai dengan Semester I (Januari-Juni) Tahun 2023 jumlah pengawasan sudah mencapai 18 kegiatan usaha.

Target pengawasan dari Kementerian Investasi/BKPM sudah tercapai 112,50% (target 16 kegiatan usaha), sedangkan target pengawasan pada DPA sudah tercapai 22,50% (target 80 kegiatan usaha). Pengawasan masih bersifat insidental dan belum terintegrasi sepenuhnya pada Sistem OSS RBA karena Subsistem Pengawasan pada OSS RBA masih dalam pengembangan.

Tabel 2. Data Pengawasan Triwulan II Tahun 2023

No.	Nama Pelaku Usaha	Lokasi Proyek	Bidang Usaha	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha
1.	PT Sri Boga Marugame Indonesia	Jl. Veteran No. 158 RT. 041 RW. 005 Kelurahan Nagrikaler Kec. Purwakarta	56101-Restoran	Besar	Menengah Rendah	Sertifikat Standar
2.	PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi	Jl. Raya Cirata No. 12 Desa Citamiang Kecamatan Maniis	35111-Pembangkitan Tenaga Listrik	Besar	Tinggi	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)
3.	PT PLN Nusantara Power	PLTA Cirata BX 126 MW Desa Cadasari Kec. Tegalwaru	35111-Pembangkitan Tenaga Listrik	Besar	Tinggi	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)
4.	PT Sinar Sukses Mandiri	Jl. Industri KM 96 Kp. Congeang Desa Cilangkap Kec. Babakan Cikao	13911-Industri Kain Rajutan	Besar	Tinggi	Izin
5.	PT PLN Nusantara Power	PLTA Cirata BX 126 MW Desa Cadasari Kecamatan Tegal Waru	35111-Pembangkitan Tenaga Listrik	Besar	Tinggi	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)
6.	PT Ardelia Mitra Perkasa	Desa Sadarkarya Kec. Darangdan	68111-Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	Besar	Menengah Rendah	Sertifikat Standar

7.	PT Poly Frame Global	Kp. Cinta Karya RT. 013 RW. 005 Desa Cikopo Kec. Bungursari	22210-Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan	Besar	Menengah Tinggi	Sertifikat Standar
8.	PT Bioaxi Medika Healthindo	Kawasan Industri Samudra Buana Texindo Blok B No.01 Desa Cislada Kec. Jatiluhur	32904-Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan	Besar	Menengah Tinggi	Sertifikat Standar
9.	PT Mitsuba Automotive Parts Indonesia	Kawasan Industri Kota Bukit Indah Blok III No 3 Desa Dangdeur Kec. Bungursar	29300-Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	Besar	Menengah Tinggi	Sertifikat Standar

Hasil pengawasan pelaksanaan penanaman modal dari 9 (sembilan) pelaku usaha dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. 9 pelaku usaha telah melaksanakan migrasi perizinan berusaha ke Sistem OSS RBA.
2. 8 pelaku usaha telah memiliki persyaratan dasar (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) / Sertifikat Laik Fungsi (SLF)).
3. 5 pelaku usaha telah memiliki perizinan berusaha (Sertifikat Standar/Izin) yang telah terverifikasi.
4. 7 pelaku usaha telah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan data tersebut, dapat dianalisis tingkat kepatuhan pelaku usaha yang telah dilakukan pengawasan pada Triwulan II Tahun 2023 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat Kepatuhan} &= \frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha Patuh Per Indikator}}{(\text{Jumlah Pelaku Usaha} \times \text{Indikator})} \times 100\% \\
 &= \frac{9 + 8 + 5 + 7}{(9 \times 4)} \times 100\% \\
 &= 80,55 \%
 \end{aligned}$$

Apabila dibandingkan dengan tingkat kepatuhan pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar 66,66 % terdapat kenaikan tingkat kepatuhan pelaku usaha yang telah dilakukan pengawasan pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar 13,89 %. Berdasarkan data tingkat kepatuhan Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2023, dapat dianalisis rata-rata tingkat kepatuhan sampai dengan Semester I Tahun 2023 sebesar 73,60 %.

Rekapitulasi hasil pengawasan, BAP dan dokumentasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

### 2.3. KENDALA PENGAWASAN

Dalam implementasinya, kegiatan pengawasan pelaksanaan penanaman modal tidak lepas dari kendala, baik kendala dari sisi pelaku usaha maupun kendala dari sisi petugas pelaksana pengawasan.

Tabel 3. Kendala Pelaku Usaha

No.	Aspek	Kendala	Rencana Tindak
1	Sistem OSS RBA	Pelaku usaha belum memahami tata cara migrasi perizinan berusaha ke OSS RBA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan layanan berbantuan OSS RBA di Mal Pelayanan Publik</li> <li>- Menyelenggarakan bimbingan teknis implementasi OSS RBA</li> </ul>
2	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Pelaku usaha belum memahami kewajiban dan tata cara penyampaian LKPM, beserta sanksinya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyelenggarakan bimbingan teknis penyampaian LKPM</li> <li>- Menyelenggarakan forum penyelesaian permasalahan bagi pelaku usaha</li> </ul>

Tabel 4. Kendala Petugas Pengawas

No.	Aspek	Kendala	Rencana Tindak
1	Subsistem Pengawasan	Subsistem Pengawasan pada OSS RBA belum berjalan maksimal, sehingga pengawasan belum terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan pengawasan secara hybrid (BAP masih manual namun tetap diupload pada sistem OSS RBA)</li> <li>- Menggunakan fitur pengawasan insidental pada sistem OSS RBA</li> </ul>
2	Sumber Daya Manusia	Beberapa petugas pengawasan masih belum memahami ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko	Memberikan edukasi dan peningkatan kompetensi terkait perizinan berusaha berbasis risiko kepada petugas pengawasan
3	Sarana / Peralatan	Beberapa kegiatan inspeksi lapangan masih menggunakan kendaraan (mobil) pribadi	Mengajukan permohonan pengadaan kendaraan (mobil) dinas untuk pengawasan
4	Prosedur	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan masih belum mengacu pada Sistem OSS RBA	Meng-update SOP Pengawasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1. KESIMPULAN**

DPMPTSP Kabupaten Purwakarta melaksanakan pengawasan terhadap pelaku usaha yang kewenangan pengawasannya berada pada pemerintah daerah kabupaten dan sudah memiliki perizinan berusaha berbasis risiko. Pengawasan dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pada Triwulan II (April-Juni) Tahun 2023 telah dilaksanakan pengawasan terhadap 9 (sembilan) pelaku usaha di wilayah Kabupaten Purwakarta, diperoleh nilai tingkat kepatuhan sebesar 80,55 % dimana yang menjadi isu utama kurang lebih masih sama dengan Triwulan I yaitu kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap Sistem OSS RBA dan kewajiban penyampaian LKPM beserta sanksinya. Berdasarkan data tingkat kepatuhan Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2023, dapat dianalisis rata-rata tingkat kepatuhan sampai dengan Semester I Tahun 2023 sebesar 73,60 %.

#### **3.2. REKOMENDASI**

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dipandang perlu meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik (OSS RBA) dan kewajiban penyampaian LKPM melalui bimbingan teknis yang lebih praktikal dengan teori yang ringkas, sehingga pelaku usaha dapat mengimplementasikannya secara langsung pada saat bimbingan teknis dilaksanakan. Selain itu dari sisi petugas pengawasan, dipandang perlu memperbaharui (*update*) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan sesuai dengan ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko dan Sistem OSS RBA.

## LAMPIRAN

**REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN**

**TRIWULAN II (APRIL - JUNI) 2023**

NO	TANGGAL PENGAWASAN	NAMA PELAKU USAHA / PERUSAHAAN	NIB	PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA	SERTIFIKAT STANDAR / IZIN	NILAI INVESTASI			TENAGA KERJA			PERMASALAHAN	HASIL PENGAWASAN	REKOMENDASI
						NILAI RENCANA	REALISASI INVESTASI	KESESUAIAN REALISASI INVESTASI	L	P	JML			
1	11 April 2023	PT Sri Boga Marugame Indonesia	8120300800129	KRK, IMB									<p>KRK peruntukan penginapan IMB peruntukan penginapan Fungsi Sekarang adalah Rumah Makan (Restoran Marugame Udon) Wajib Andalal lalin Pemilik brand adalah PT Sariboga Marugame Indonesia Perjanjiaan kotrak kerja pemilik bangunan (Ir. Stephanus Lie) dan Penyewa PT Sariboga Marugame Indonesia belum dilampirkan PT Sari Boga Marugame Indonesia belum mendaftarkan proyek di Purwakarta pada OSS-RBA Dokumen Lingkungan KBLI 56101 skala menengah/besar harus UKL_UPL</p> <p>KRK dan IMB tidak perlu dirubah karena masih dalam fungsi Komersial/Usaha</p>	<p>AndalLalin UKL-UPL Perizinan berusaha: NIB dan Sertifikat Standar (OSS-RBA) PBUMKU : Laik Higenis Persetujuan warga sekitar atas kegiatan usaha restoran/rumah makan diketahui Kelurahan dan Camat Stempat</p>

NO	TANGGAL PENGAWASAN	NAMA PELAKU USAHA / PERUSAHAAN	NIB	PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA	SERTIFIKAT STANDAR / IZIN	NILAI INVESTASI			TENAGA KERJA			PERMASALAHAN	HASIL PENGAWASAN	REKOMENDASI
						NILAI RENCANA	REALISASI INVESTASI	KESESUAIAN REALISASI INVESTASI	L	P	JML			
2	04 Mei 2023	PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI MASDAR SOLAR ENERGI	0220302790871	NIB, PKKPR, Amdal, LKPM	Izin	356.462.487.748	356.462.487.748	Sesuai	6	3	9	PT. PJB Masdar Solar Energi ini terletak di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bandung Barat. Pada saat melaporkan LKPM pelaku usaha belum dapat melakukan sesuai dengan fakta lapangan bahwa pelaporan dilakukan pada masing-masing daerah.		Pelaporan LKPM di split sesuai letak proyeknya. Dibagi sesuai porsinya untuk Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bandung Barat.
3	10 Mei 2023	PT PLN Nusantara Power	8120002971007	NIB, PKKPR, Amdal, LKPM	Izin	31.374.201.268.514	31.374.201.268.514	Sesuai	142		142	kesulitan dalam pemrosesan persetujuan bangunan gedung (PBG) dalam persyaratan teknis diwajibkan melampirkan gambar detil bangunan bendungan, sedangkan bangunan bendungan merupakan objek vital nasional yang sangat dijaga kerahasiaannya	> Bangunan selain bendungan tetap diwajibkan memiliki PBG sesuai PP 16 Tahun 2021 > Untuk bangunan bendungan akan dijonsultasikan lebih lanjut kepada instansi Teknisis terkait	> Agar berkonsultasi ke Dinas pekerjaan Umum dan Tata Ruang terkait pemenuhan persyaratan teknis > Untuk memenuhi standar teknis gedung sebagai salah satu persyaratan PBG agar memilih konsultan yang berpengalaman dan tersertifikasi > Harap Menyampaikan LKPM Triwulan II tahun 2023 sesuai ketentuan yang berlaku

NO	TANGGAL PENGAWASAN	NAMA PELAKU USAHA / PERUSAHAAN	NIB	PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA	SERTIFIKAT STANDAR / IZIN	NILAI INVESTASI			TENAGA KERJA			PERMASALAHAN	HASIL PENGAWASAN	REKOMENDASI
						NILAI RENCANA	REALISASI INVESTASI	KESESUAIAN REALISASI INVESTASI	L	P	JML			
4	30 Mei 2023	PT Sinar Sukses Mandiri	8120114'30569	NIB, Izin Lokasi, Amdal, IMB	Izin	34.155.064.000	34.155.064.000	Sesuai	500	500	1.000		Terdapat beberapa bangunan yang belum memiliki persetujuan bangunan gedung (PBG) LKPM triwulan I tahun 2023 sudah dilaporkan	Agar melakukan revisi site plain dan disahkan oleh DPUTR apabila ada perubahan Agar melakukan PBG terutama pada gedung yang sudah terbangun Agar menyampaikan LKPM triwulan II pada Juli 2023 Waktu pertimbangan untuk menyelesaikan semua rekomendasi ini adalah 2 bulan dari BAP ini ditanda tangani
5	31 Mei 2023	PT PLN Nusantara Power	8120002971007	NIB, PKKPR, Amdal, LKPM	Izin	476.483.644.484	476.483.644.484	Sesuai	143	17	160	Adanya holding dan subholding PT PLN Persero yang mengakibatkan terjadinya perubahan nama yang awalnya PT PJB menjadi PT PLN Nusantara Power	> Bangunan selain bendungan tetap diwajibkan memiliki PBG sesuai PP 16 Tahun 2021 > Untuk bangunan bendungan akan dijonsultasikan lebih lanjut kepada instansi Teknisis terkait	> Agar berkonsultasi ke Dinas pekerjaan Umum dan Tata Ruang terkait pemenuhan persyaratan teknis > Untuk memenuhi standar teknis gedung sebagai salah satu persyaratan PBG agar memilih konsultan yang berpengalaman dan tersertifikasi > Harap Menyampaikan LKPM Triwulan II tahun 2023 sesuai ketentuan yang berlaku

NO	TANGGAL PENGAWASAN	NAMA PELAKU USAHA / PERUSAHAAN	NIB	PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA	SERTIFIKAT STANDAR / IZIN	NILAI INVESTASI			TENAGA KERJA			PERMASALAHAN	HASIL PENGAWASAN	REKOMENDASI
						NILAI RENCANA	REALISASI INVESTASI	KESESUAIAN REALISASI INVESTASI	L	P	JML			
6	12 Juni 2023	PT Ardelia Mitra Perkasa	9120608802592	NIB, PKKPR	Sertifikat standar						-	Penguasaan lahan masih nihil Izin lokasi terbit tetapi peta tidak ada karena belum ada pertimbangan teknis pertanahan dari BPN Izin lokasi telah habis dan akan dilakukan kembali atas nama PT. Yahya	PT yahya akan mengajukan PKKPR melalui OSS-RBA	
7	12 Juni 2023	PT Poly Frame Global	0220105161746	Izin Lokasi, UKL-UPL,IMB	Sertifikat Standar	11.634.034.895	11.634.034.895	Sesuai	45	5	50		> LKPM wajib dilaporkan secara berkala > IPAT Masih proses > Sudah ada rekom dari PDAM Kab Purwakarta untuk pengurusan IPAT	> LKPM wajib disampaikan secara berkala > Pengajuan SLF > Pengajuna IPAT > Migrasi OSS 1.1 ke OSS-RBA > Laporan UKL-UPL persemester ke DLH
8	14 Juni 2023	PT Bioaxi Medika healthindo	8120219180676	PKKPR, UKL-UPL, Persetujuan Lingkungan, IMB	Sertifikat Standar	289.681.455.885	289.681.455.885	Sesuai	35	32	67	Kesulitan dalam melaporkan LKPM karena dari bagian keuangan closing pada tanggal akhir melaporkan	> Belum menyampaikan LKPM Triwulan I tahun 2023 > Pelaporan LKPM akan diakumulasi di triwulan II > Perizinan dasar sudah lengkap	> Agar melaporkan LKPM akumulasi dari Triwulan I dan Triwulan II tahun 2023 > Untuk Melaporkan LKPM Per KBLI > Untuk merevisi luas lahan di PKKPR dari 50 meter persegi menjadi 2 Ha > Untuk permasalahan LKPM dan PKKPR agar berkoordinasi ke MPP Bale Madukara

NO	TANGGAL PENGAWASAN	NAMA PELAKU USAHA / PERUSAHAAN	NIB	PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA	SERTIFIKAT STANDAR / IZIN	NILAI INVESTASI			TENAGA KERJA			PERMASALAHAN	HASIL PENGAWASAN	REKOMENDASI
						NILAI RENCANA	REALISASI INVESTASI	KESESUAIAN REALISASI INVESTASI	L	P	JML			
9	16 Juni 2023	PT Mitsuba automotive Part Indonesia	8120000962953	NIB, PKKPR, Amdal, LKPM	Izin	1.446.764.644	1.446.764.644	Sesuai	131	117	248	Pada tahun 2022 periode triwulan IV sering terjadi aliran listrik terputus sehingga aktivitas/kegiatan ulititas menjadi tertanggu	Laporan terakhir yang dilaporkan pada LKPM sd triwulan I tahun 2023 patuh dan dilaporkan secara rutin dan berkala PT Mitsuba automotive part indonesia merupakan peralihan dari PT Jideco Indonesia sejak tahun 2014	Agar melakukan koordinasi dengan kementerian perindustrian mengenai pemenuhan persyaratan sertifikat standar terbaru agar selalu menyampaikan LKPM untuk seluruh KBLI harus mengupdate ulang sertifikat standar yang tidak berlaku



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**( D P M P T S P )**

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp./Fax. 0264-8224794  
Website : dpmpstp.purwakartakab.go.id Email : info@dpmpstp.purwakartakab.go.id

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)**

Nomor : BA/016/Pengdal/IV/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal 11 bulan April tahun 2023,  
yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan,  
telah melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko :

**I. KETERANGAN PERUSAHAAN**

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	Marugame Udon / PT. Sriboga Marugame Indonesia	
2.	Alamat Lokasi Proyek	Jl. Veteran No. 158 RT. 041 RW. 005 Desa/Kelurahan <u>Nagrikaler</u> Kecamatan <u>Purwakarta</u> Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat	
3.	Luas Lahan	<u>357</u> m <sup>2</sup> / <del>ha</del>	
4.	Nama dan Kontak Penanggung Jawab di lokasi proyek	Nama	<u>Agus Arubawati</u>
		No. HP	<u>0818 0782 0409</u>

**II. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN**

1.	Nomor dan Tanggal Penerbitan Nomor Induk Berusaha	NIB	<u>8120300800129</u>		
		Tanggal	<u>13 April 2023</u>		
2.	Nomor Kode Proyek	<u>202304-1409-2703-7767-120</u>			
3.	Kegiatan Usaha (KBLI 4 digit)	Kode KBLI	<u>5610</u>		
		Judul KBLI	<u>Restoran dan Penyedia Makanan Keliling</u>		
4.	Bidang Usaha (KBLI 5 digit)	Kode KBLI	<u>56101</u>		
		Judul KBLI	<u>Restoran</u>		
5.	Kapasitas Produksi Per Tahun	<b>Jenis</b>	<b>Kapasitas</b>	<b>Satuan</b>	
6.	Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha	<b>a. Izin Lokasi / KPR / KRK</b>			
		Nomor	<u>591/KRK.130-DPMPSTP/2019</u>		
		Tanggal	<u>18 November 2019</u>		
		<b>b. SPPL / UKL-UPL / AMDAL</b>			
		Nomor			
		Tanggal			

		<b>c. Izin / Persetujuan Lingkungan</b>	
		Nomor	
		Tanggal	
		<b>d. IMB / PRG</b>	
		Nomor	601 / IMB - 1212 / DPMPTP / 2020
		Tanggal	25 Juni 2020
		<b>e. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)</b>	
		Nomor	
		Tanggal	
7.	Sertifikat Standar / Izin	<b>a. Sertifikat Standar</b>	
		Nomor	
		Tanggal	
		<b>b. Izin</b>	
		Nomor	
		Tanggal	
8.	Fasilitas Penanaman Modal	Nomor	
		Tanggal	
9.	Pemenuhan Standar Usaha		
10.	Pemenuhan Standar Produk	a. Standar	
		b. Sertifikasi	
		c. Lisensi	
		d. Pendaftaran Barang	
		e. Lain-lain	

11.	Nilai Rencana dan Realisasi Investasi											
	Komponen				Rencana (OSS)		Realisasi (LKPM)					
	a. Pembelian dan Pematangan Tanah											
	b. Bangunan / Gedung											
	c. Mesin / Peralatan Dalam Negeri											
	d. Mesin / Peralatan Impor											
	e. Investasi Lain-lain											
	Modal Tetap (a + b + c + d + e)											
	Modal Kerja											
	Total Nilai Investasi											
Kesesuaian Nilai Realisasi Investasi di Lapangan (Sesuai / Tidak Sesuai)												
12.	Penyerapan Tenaga Kerja				Rencana (Orang)		Realisasi (Orang)					
					TKI		TKA		TKI		TKA	
					L	P	L	P	L	P	L	P
13.	Kewajiban				Divestasi							
					Pelatihan TKI							
					CSR							
					Kemitraan							
					Alih Teknologi							
					Pengelolaan Lingkungan							
					.....							
14.	Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha				a. Teknis							
					b. Administrasi							
15.	Progres Produksi Komersial				Proyek pembangunan akan selesai pada							
					Proyek mulai beroperasi pada							

### III. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

### IV. HASIL PENGAWASAN

- KRK : Pengirapan
- IMB : Pengirapan
- Fungsi sekarang : Rumah Makan / Restoran Mangrove Udang
- Wajib ANDAL LAIN : Kapasitas Kursi > 100 (100 - 150)
- Pemilik Brand : PT. Sriboga Mangrove Indonesia
- Perjanjian Kontrak antara pemilik bangunan (Ir. Stephanes Lie) dan Pengusaha (PT. Sriboga) belum ditandatangani
- PT. Sriboga belum mendaftarkan proyek di Puncakata pada OSS RBA
- Dokumen lingkungan KBL 56101 skala menengah/besar → UKL UPL
- KRK dan IMB tidak perlu diubah, masih fungsi komersial / usaha

### V. DOKUMEN PENDUKUNG

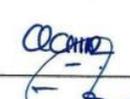
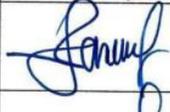
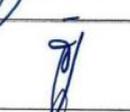
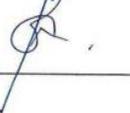
- KRK
- IMB
- GSB : 12 m  
GSP : 8 m > sesuai
- Luas Lahan Terbuka : 214,2 m<sup>2</sup> (60%)  
Luas Lahan Terbuka : 142,8 m<sup>2</sup> (40%)

**VI. REKOMENDASI**

Sebelum operasional wajib meykopi dokumen perizinan sbb:

1. ANDAL LAIN
2. UKL UPL
3. Perizinan Benahka : NIB dan Sertifikat Standar (OSS RBA)
4. PB-UMKU : Laik Hygiene (OSS RBA)
5. Persetujuan warga sekitar atas kegiatan usaha restoran / rumah makan, diketahui Kepala Kelurahan dan Camat setempat.

Pemeriksa,

No.	Nama	Jabatan	Instansi	Tanda Tangan
1.	Kunto Aji	Ketua Tim Pengawasan	DPMPESP	
2.	OCTIVIANI	Anggota.	DPMPESP	
3.	Heli Lukman	Anggota	DPMPESP	
4.	Iwan Sukma P	JF Tabung.	DPUR	
5.	Dede Iskandar	LURAH	KELURAHAN	
6.	Dede Heru	Kasi Sanlit	Kelurahan	
7.	Ahmad Soleh	Anggota	DPMPESP	
8.	LINGGA	Anggota	DPMPESP	

Mengetahui,  
Pimpinan / Penanggung  
Jawab Perusahaan

  
NANI KURNIATI  
CADD.

Nama : .....  
Jabatan : .....

**KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
PT. SRIBOGA MERUGAME UDON  
SELASA 11 APRIL 2023**





PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
( D P M P T S P )

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp./Fax. 0264-8224794  
Website : dpmptsp.purwaktakab.go.id Email : info@dpmptsp.purwaktakab.go.id

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)**

Nomor : BA/017/Pengdal/V/2023

Pada hari ini, Kamis..... tanggal .....4..... bulan .....Mei..... tahun .....2023....., yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan, telah melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko :

**I. KETERANGAN PERUSAHAAN**

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	PT. Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi	
2.	Alamat Lokasi Proyek	Jl. Raya Cirata no.12 Desa/Kelurahan Citamiang Kecamatan Manis Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat	
3.	Luas Lahan	240 <del>m</del> Ha (air) 40 Ha (darat)	
4.	Nama dan Kontak Penanggung Jawab di lokasi proyek	Nama	Hori Prastowo
		No. HP	082112224879

**II. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN**

1.	Nomor dan Tanggal Penerbitan Nomor Induk Berusaha	NIB	0220302790871	
		Tanggal	7 Juli 2020	
2.	Nomor Kode Proyek	202009-1400-1002-2801-A26		
3.	Kegiatan Usaha (KBLI 4 digit)	Kode KBLI	3511	
		Judul KBLI	Penyediaan Tenaga Listrik	
4.	Bidang Usaha (KBLI 5 digit)	Kode KBLI	35111	
		Judul KBLI	Pembangkitan Tenaga Listrik	
5.	Kapasitas Produksi Per Tahun	<b>Jenis</b>	<b>Kapasitas</b>	<b>Satuan</b>
6.	Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha	<b>a. Izin Lokasi / KKPR / KRK</b>		
		Nomor		
		Tanggal	5 Oktober 2020	
		<b>b. SPPL / UKL-UPL / AMDAL</b>		
		Nomor		
		Tanggal		

		<b>c. Izin / Persetujuan Lingkungan</b>	
		Nomor	660 / 3 / ESDA
		Tanggal	02 Februari 2021
		<b>d. IMB / PBG</b>	
		Nomor	601 / IMB - 1698 / DPMPSTP / 2021
		Tanggal	7 Mei 2021
		<b>e. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)</b>	
		Nomor	
		Tanggal	
7.	Sertifikat Standar / Izin	<b>a. Sertifikat Standar</b>	
		Nomor	
		Tanggal	
		<b>b. Izin</b>	
		Nomor	
		Tanggal	
8.	Fasilitas Penanaman Modal	Nomor	
		Tanggal	
9.	Pemenuhan Standar Usaha	IMB: 1. No: 601 / IMB - 1766 / DPMPSTP / 2021 Tgl: 19 Mei 2021	
10.	Pemenuhan Standar Produk	a. Standar	
		b. Sertifikasi	
		c. Lisensi	
		d. Pendaftaran Barang	
		e. Lain-lain	

11. Nilai Rencana dan Realisasi Investasi										
Komponen					Rencana (OSS)			Realisasi (LKPM)		
a. Pembelian dan Pematangan Tanah								2.713.458.897		
b. Bangunan / Gedung								6.394.780.283		
c. Mesin / Peralatan Dalam Negeri								135.593.229.191		
d. Mesin / Peralatan Impor										
e. Investasi Lain-lain								216.761.019.377		
Modal Tetap (a + b + c + d + e)								356.462.487.748		
Modal Kerja								0		
Total Nilai Investasi								356.462.487.748		
Kesesuaian Nilai Realisasi Investasi di Lapangan (Sesuai / Tidak Sesuai)										
12. Penyerapan Tenaga Kerja					Rencana (Orang)				Realisasi (Orang)	
					TKI		TKA		TKI	TKA
					L	P	L	P	L	P
					6	3	1	-	6	3
					9		1		9	1
					10				10	
13. Kewajiban					Divestasi					
					Pelatihan TKI					
					CSR					
					Kemitraan					
					Alih Teknologi					
					Pengelolaan Lingkungan					
					.....					
14. Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha					a. Teknis					
					b. Administrasi					
15. Progres Produksi Komersial					Proyek pembangunan akan selesai pada					
					Proyek mulai beroperasi pada					

### III. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

PT. Pembangkitan Jawa Bali masdar Solar Energi ini terletak di 2 Kabupaten yaitu Kab. Purwakarta dan Kab. Bandung Barat, pada saat melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman modal (LKPM) pelaku usaha belum dapat melakukan sesuai dgn fakta lapangan bhw pelaporan dilakukan pada 2 Kabupaten, LKPM yang masuk untuk Kabupaten Bandung Barat.

### IV. HASIL PENGAWASAN

Terkait permasalahan tsb, pelaku usaha telah melakukan konsultasi dgn pihak BKPM, dan secara rinci telah dipaparkan kronologis dari mulai terbit NIB yg dikeluarkan tgl 7 Juli 2020 oleh Kab. Purwakarta dgn alamat lokasi di Cirata, dan terbit NIB tgl 9 September 2021 dgn lokasi di Kab. Bandung Barat, sampai laporan LKPM yg telah diinput di triwulan 1 tahun 2023. Akan tetapi pihak BKPM tidak menjelaskan secara rinci solusi dari permasalahan ini, hanya menjelaskan mengenai Fasilitas yg diterima oleh pelaku usaha tidak akan hangus.

Untuk permasalahan ini, solusi dari pihak DPMPSTP Kab. Purwakarta akan membuat laporan kembali ke BKPM dgn melampirkan beberapa dokumen perizinan yg sudah diterbitkan oleh DPMPSTP beserta lampiran site plan dan peta hi-res sebagai dokumen penunjang yg menguatkan bhw lokasi proyek PMSE lebih banyak di Kab. Purwakarta.

### V. DOKUMEN PENDUKUNG

1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)  
Tgl terbit : 9 Juli 2021, perubahan ke 13 tgl : 25 Juni 2021
2. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan  
No: 522/2/28.2.03.0 / DPMPSTP/2021 (10 Februari 2021)
3. Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (BKPM)  
No: 9/TH/PMA/2021 (10 Mei 2021)
4. Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan PLTS Terapung 145 Mw Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta  
No: 660/5/11.1.02.0 / DPMPSTP/2021 (02 Februari 2021) → PPTP POU Jabar

**VI. REKOMENDASI**

- Pelaporan LKPM di split sesuai tatak pronyek nya , dibagi sesuai porsi nya untuk Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bandung Barat dan dilaporkan terpisah.

Pemeriksa,

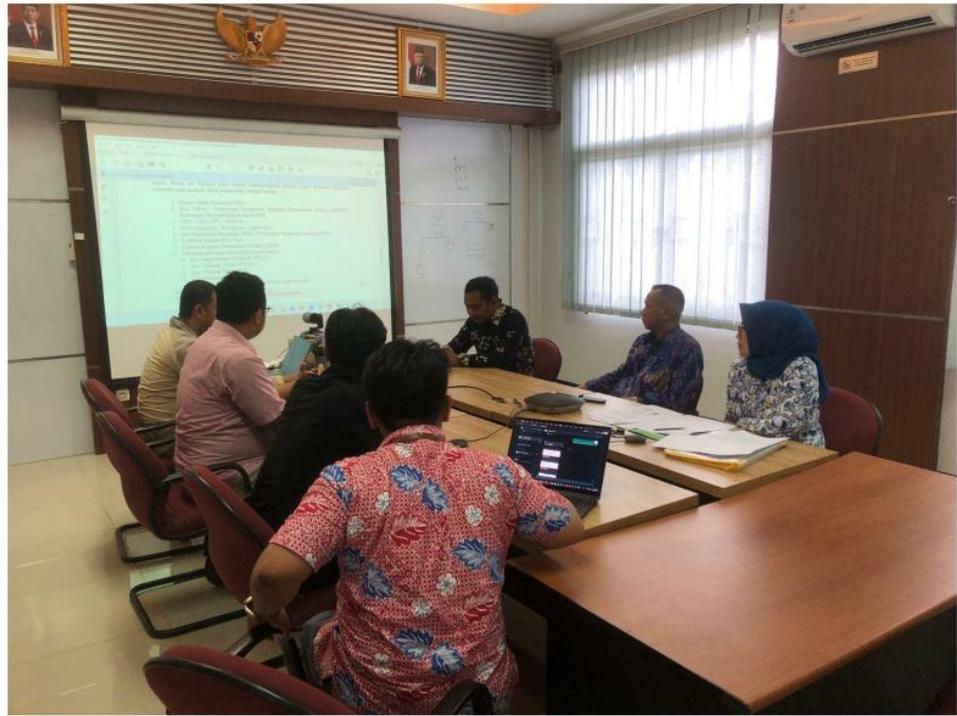
No.	Nama	Jabatan	Instansi	Tanda Tangan
1.	Hariman Budi A, ST, MT.	Kepala Dinas	DPMPTSP	
2.	Heri Lukman Y, SH	Penata Kelola PM Ahli Madya	DPMPTSP	
3.	Dewi Susanti	Pengawas PM	DPMPTSP	
4.	Alfred P. Sinambela	Finance & Administration Director	PT PMSE	
5.	Hori Prastowo	Finance & Acc Mgr	PMSE	
6.	ARIPRIANTONI	Plan Manager	PT PMSE	
7.	Kunto An	PKPM Ahli Madya	DPMPTSP	

Mengetahui,  
Pimpinan / Penanggung  
Jawab Perusahaan



Nama : Alfred P. Sinambela  
Jabatan : Finance & Administration Director

**KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
PT. PJB MASDAR SOLAR ENERGI  
KAMIS 04 MEI 2023**





**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
( D P M P T S P )**

Jl. Veteran No. 139 Purwokarta 41115 Telp./Fax. 0264-8224794  
Website : dpmpdsp.purwakartakab.go.id Email : info@dpmpdsp.purwakartakab.go.id

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)**

Nomor : BA/018 / Pengdal / V / 2023

Pada hari ini, Rabu tanggal 10 bulan Mei tahun 2023,  
yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan,  
telah melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko :

**I. KETERANGAN PERUSAHAAN**

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	PT. PLN Nubantara Power		
2.	Alamat Lokasi Proyek	PLTA Curah 8x126 MW Desa/Kelurahan <u>Cabesari</u> Kecamatan <u>Pegalangan</u> Kabupaten Purwokarta, Provinsi Jawa Barat		
3.	Luas Lahan	<u>6.200</u>	m <sup>2</sup> /Ha	
4.	Nama dan Kontak Penanggung Jawab di lokasi proyek	Nama	<u>elwin Kurniawan.</u>	
		No. HP	<u>0812 9149 0316</u>	

**II. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN**

1.	Nomor dan Tanggal Penerbitan Nomor Induk Berusaha	NIB	<u>812 000 297 1007</u>		
		Tanggal	<u>10 September 2018</u>		
2.	Nomor Kode Proyek	<u>202304-1314-4850-0318-154</u>			
3.	Kegiatan Usaha (KBLI 4 digit)	Kode KBLI	<u>3511</u>		
		Judul KBLI	<u>Penyediaan Tenaga Listrik</u>		
4.	Bidang Usaha (KBLI 5 digit)	Kode KBLI	<u>35111</u>		
		Judul KBLI	<u>Pembangkitan Tenaga listrik</u>		
5.	Kapasitas Produksi Per Tahun	<b>Jenis</b>	<b>Kapasitas</b>	<b>Satuan</b>	
		<u>listrik</u>	<u>1.008</u>	<u>MW</u>	
6.	Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha	<b>a. Izin Lokasi / KKPR / KRK</b>			
		Nomor	<u>- Objek vital Nasional</u>		
		Tanggal	<u>-</u>		
		<b>b. SPPL / UKL-UPL + AMDAL izin lingkungan.</b>			
	Nomor	<u>660 / 11 / 11.1 / 02.0 / DPMPDSP / 2020</u>			
	Tanggal	<u>26 Juni 2020</u>			

		<b>c. Izin / Persetujuan Lingkungan <i>AMDAL</i></b>	
		Nomor	<i>3231.A 0115 / CJ.R / 1997</i>
		Tanggal	<i>29 Agustus 1997</i>
		<b>d. IMB / PBG</b>	
		Nomor	-
		Tanggal	-
		<b>e. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)</b>	
		Nomor	-
		Tanggal	-
7.	Sertifikat Standar / Izin	<b>a. Sertifikat Standar</b>	
		Nomor	-
		Tanggal	-
		<b>b. Izin</b>	
		Nomor	<i>812 000 297 100 70146</i>
		Tanggal	<i>19 April 2023 .</i>
8.	Fasilitas Penanaman Modal	Nomor	-
		Tanggal	-
9.	Pemenuhan Standar Usaha	-	
10.	Pemenuhan Standar Produk	a. Standar	-
		b. Sertifikasi	-
		c. Lisensi	-
		d. Pendaftaran Barang	-
		e. Lain-lain	-

11.	Nilai Rencana dan Realisasi Investasi							
	Komponen				Rencana (OSS)		Realisasi (LKPM)	
	a. Pembelian dan Pematangan Tanah				8.034.320.758.326.			
	b. Bangunan / Gedung				Rp. 750.612.680.908			
	c. Mesin / Peralatan Dalam Negeri							
	d. Mesin / Peralatan Impor				17.191.957.712.388			
	e. Investasi Lain-lain				163.958.295.699			
	Modal Tetap (a + b + c + d + e)							
	Modal Kerja				233.357.820.955			
	Total Nilai Investasi				Rp 31.374.201.268.544		31.374.201.268.544	
	Kesesuaian Nilai Realisasi Investasi di Lapangan (Sesuai / Tidak Sesuai)							
12.	Penyerapan Tenaga Kerja				Rencana (Orang)		Realisasi (Orang)	
					TKI		TKA	
					L		P	
					L		P	
					L		P	
							142	
13.	Kewajiban				Divestasi <input checked="" type="checkbox"/> Pelatihan TKI <input checked="" type="checkbox"/> CSR Kemitraan <input checked="" type="checkbox"/> Alih Teknologi <input checked="" type="checkbox"/> Pengelolaan Lingkungan .....			
14.	Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha				a. Teknis Telah memenuhi ketentuan penyediaan Tenaga listrik untuk kepentingan umum. b. Administrasi Telah memenuhi ketentuan perizinan Basmaha berbagai Risiko			
15.	Progres Produksi Komersial				Proyek pembangunan akan selesai pada		-	
					Proyek mulai beroperasi pada		.	

### III. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

- Kesulitan dalam pemrosesan persyaratan Bangunan Gedung (PBG), dalam persyaratan teknis diwajibkan melampirkan gambar detail bangunan beredung, sedangkan bangunan beredung merupakan objek vital Nasional yang sangat dijaga ke rahasiannya.

### IV. HASIL PENGAWASAN

- Bangunan selain beredung tetap diwajibkan memiliki PISC sesuai pp 16 Tahun 2021.
- Untuk Bangunan Beredung akan di konsultasikan lebih lanjut kepada Instansi Teknis Terkait

### V. DOKUMEN PENDUKUNG

1. NIB
2. PKPR
3. Izin
4. AMDA
5. UPM

**VI. REKOMENDASI**

- Agar berkonsultasi ke dinas pekerjaan umum dan Tata Ruang terkait pemenuhan persyaratan PRT
- Untuk memenuhi standar teknis gedung sebagai salah satu persyaratan PRT agar memilih konsultan yang berpengalaman dan ter sertifikasi
- Harap menyampaikan UPM triwulan I 2023 sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemeriksa,

No.	Nama	Jabatan	Instansi	Tanda Tangan
1.	Kunto AW	PKPM Ahli Madya	DPMPPTSP	
2.	Ryan E	Perencana Perizinan	DPMPDSE	

Mengetahui,  
Pimpinan / Penanggung  
Jawab Perusahaan



Nama : Sopiah Hadi R  
Jabatan : Asman Umum CSR  
& Pam Aset.

**KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
PT. PLN NUSANTARA POWER  
RABU 10 MEI 2023**





**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
( D P M P T S P )**

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp./Fax. 0264-8224794  
Website : dpmpstp.purwakartakab.go.id Email : info@dpmpstp.purwakartakab.go.id

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)**

Nomor : BA / 019 / Pengdal / II / 2023

Pada hari ini, .....*Selasa*..... tanggal ...*30*.... bulan .....*Mei*..... tahun .....*2023*....., yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan, telah melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko :

**I. KETERANGAN PERUSAHAAN**

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	<i>PT. Sinar Silises Mandiri</i>	
2.	Alamat Lokasi Proyek	<i>Jl. Industri Km. 96 KP- Congeang Desa/Kelurahan .....<i>Celangkep</i>..... Kecamatan .....<i>Babakan Celao</i>..... Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat</i>	
3.	Luas Lahan	<i>180.000 m<sup>2</sup>/Ha</i>	
4.	Nama dan Kontak Penanggung Jawab di lokasi proyek	Nama	<i>Diah Fanni</i>
		No. HP	<i>0812 93405215</i>

**II. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN**

1.	Nomor dan Tanggal Penerbitan Nomor Induk Berusaha	NIB	<i>812 011 413 05 69</i>	
		Tanggal	<i>06 November 2018</i>	
2.	Nomor Kode Proyek	<i>201912-3005-5842-6007-380</i>		
3.	Kegiatan Usaha (KBLI 4 digit)	Kode KBLI	<i>1391</i>	
		Judul KBLI	<i>Industri Kain Rajutan dan Sotaman</i>	
4.	Bidang Usaha (KBLI 5 digit)	Kode KBLI	<i>13911</i>	
		Judul KBLI	<i>Industri Kain Rajutan</i>	
5.	Kapasitas Produksi Per Tahun	<b>Jenis</b>	<b>Kapasitas</b>	<b>Satuan</b>
		<i>Kain Printing Kain Celup</i>		
6.	Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha	<b>a. Izin Lokasi / KKPR / KRK</b>		
		Nomor	<i>503 / k.p. 427 / Bapmpstp / 2014</i>	
		Tanggal	<i>15 Juni 2015</i>	
		<b>b. SPPL / UKL-UPL / AMDAL</b>		
		Nomor	<i>666 / 62 / IX / DUA / 2020</i>	
		Tanggal	<i>30 September 2020</i>	

		<b>c. Izin / Persetujuan Lingkungan</b>	
		Nomor	1884/sk.29/DL#/2018
		Tanggal	28 Maret 2018.
		<b>d. IMB / PBG</b>	
		Nomor	503/IMB.387-PPMPTSP/2018.
		Tanggal	12. September 2018.
		<b>e. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)</b>	
		Nomor	-
		Tanggal	-
7.	Sertifikat Standar / Izin	<b>a. Sertifikat Standar</b>	
		Nomor	-
		Tanggal	
		<b>b. Izin</b>	
		Nomor	71/32/IV/PMN/2016.
		Tanggal	26 oktober /2016.
8.	Fasilitas Penanaman Modal	Nomor	
		Tanggal	
9.	Pemenuhan Standar Usaha		
10.	Pemenuhan Standar Produk	a. Standar	
		b. Sertifikasi	
		c. Lisensi	
		d. Pendaftaran Barang	
		e. Lain-lain	

11.	Nilai Rencana dan Realisasi Investasi							
	Komponen				Rencana (OSS)		Realisasi (LKPM)	
	a. Pembelian dan Pematangan Tanah							
	b. Bangunan / Gedung							
	c. Mesin / Peralatan Dalam Negeri							
	d. Mesin / Peralatan Impor							
	e. Investasi Lain-lain							
	Modal Tetap (a + b + c + d + e)						26.155.064.000	
	Modal Kerja						8.000.000.000	
	Total Nilai Investasi						34.155.064.000	
	Kesesuaian Nilai Realisasi Investasi di Lapangan (Sesuai / Tidak Sesuai)							
12.	Penyerapan Tenaga Kerja				Rencana (Orang)		Realisasi (Orang)	
					TKI		TKA	
					L	P	L	P
							500	500
							1.000	
13.	Kewajiban				Divestasi Pelatihan TKI CSR Kemitraan Alih Teknologi Pengelolaan Lingkungan .....			
14.	Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha				a. Teknis  b. Administrasi			
15.	Progres Produksi Komersial				Proyek pembangunan akan selesai pada  Proyek mulai beroperasi pada			

### III. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

.

### IV. HASIL PENGAWASAN

- Terdapat beberapa bangunan yang belum mempunyai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
- Lkpm Triwulan I Tahun 2023 sudah di laporkan.

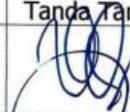
### V. DOKUMEN PENDUKUNG

Imb	503 / IMB . 387 - DPMPTSP / 2018 ,,	12 September 2018 .
	503 / IMB . 437 - DPMPTSP / 2017 .	10. Agustus 2017
	503 / ImB. 695 - <del>DPMPTSP</del> / 205	10. Desember 2015
IPAL	660 - 31 / IPAL . 0935 / DPMPTSP / 2021	15 Maret 2021

**VI. REKOMENDASI**

- Asas melakukan revisi site plan & di sahkan oleh DPUTR. Apabila ada perubahan.
- Asas mengizinkan PBS terutama pada gedung yang sudah terbangun
- Asas menyampaikan UERM triwulan II pada 1 Juli 2023.
- Waktu pertimbangan untuk menyelesaikan semua rekomendasi Biatas adalah 2 bulan dari BAP ini di tanda tangani

Pemeriksa,

No.	Nama	Jabatan	Instansi	Tanda Tangan
1	Kunto Anu	Peng. Kelola PM	DPMPDB	
2	Hari Lubman	Jf. Ales Mary	- - -	
3	OCTIVIANI	PP PERKINAN	DPMPSTP	
4	Iwan Sukma P	JF. Jabang	DPUTR	
5	Ahmad Soleh	Pengurus PM	DPMPSTP	

Mengetahui,  
Pimpinan / Penanggung  
Jawab Perusahaan



Nama : Draht Fanni  
Jabatan : HREA Manager

**KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
PT. SINAR SUKSES MANDIRI  
SELASA 30 MEI 2023**





PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
( D P M P T S P )

Jl. Veteran No. 139 Purwokarta 41115 Telp./Fax. 0264-8224794  
Website : dpmpstp.purwarkartakab.go.id Email : info@dpmpstp.purwarkartakab.go.id

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)**

Nomor : BA / 020 / Pengdal / VI / 2023

Pada hari ini, Senin tanggal 12 bulan Juni tahun 2023,  
yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan,  
telah melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko :

**I. KETERANGAN PERUSAHAAN**

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	PT. Ardelia Mitra Perkasa	
2.	Alamat Lokasi Proyek	Desa/Kelurahan <u>Sadar Karya</u> Kecamatan <u>Darangdan</u> Kabupaten Purwokarta, Provinsi Jawa Barat	
3.	Luas Lahan	50	m <sup>2</sup> /Ha
4.	Nama dan Kontak Penanggung Jawab di lokasi proyek	Nama	
		No. HP	

**II. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN**

1.	Nomor dan Tanggal Penerbitan Nomor Induk Berusaha	NIB	9120608802592	
		Tanggal	29 Agustus 2019	
2.	Nomor Kode Proyek	202010-0912-5145-9.12-245		
3.	Kegiatan Usaha (KBLI 4 digit)	Kode KBLI	6811	
		Judul KBLI	Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Direwa	
4.	Bidang Usaha (KBLI 5 digit)	Kode KBLI	68110	
		Judul KBLI	Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Direwa	
5.	Kapasitas Produksi Per Tahun	<b>Jenis</b>	<b>Kapasitas</b>	<b>Satuan</b>
6.	Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha	<b>a. Izin Lokasi / KKPR / KRK</b>		
		Nomor	04092110213214007	
		Tanggal	04 September 2021	
		<b>b. SPPL / UKL-UPL / AMDAL</b>		
		Nomor		
		Tanggal		

		<b>c. Izin / Persetujuan Lingkungan</b>	
		Nomor	
		Tanggal	
		<b>d. IMB / PBG</b>	
		Nomor	
		Tanggal	
		<b>e. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)</b>	
		Nomor	
		Tanggal	
7.	Sertifikat Standar / Izin	<b>a. Sertifikat Standar</b>	
		Nomor	91206088025920003
		Tanggal	12 Juni 2023
		<b>b. Izin</b>	
		Nomor	
		Tanggal	
8.	Fasilitas Penanaman Modal	Nomor	
		Tanggal	
9.	Pemenuhan Standar Usaha		
10.	Pemenuhan Standar Produk	a. Standar	
		b. Sertifikasi	
		c. Lisensi	
		d. Pendaftaran Barang	
		e. Lain-lain	

11.	Nilai Rencana dan Realisasi Investasi											
	Komponen				Rencana (OSS)				Realisasi (LKPM)			
	a. Pembelian dan Pematangan Tanah											
	b. Bangunan / Gedung											
	c. Mesin / Peralatan Dalam Negeri											
	d. Mesin / Peralatan Impor											
	e. Investasi Lain-lain											
	Modal Tetap (a + b + c + d + e)											
	Modal Kerja											
	Total Nilai Investasi											
	Kesesuaian Nilai Realisasi Investasi di Lapangan (Sesuai / Tidak Sesuai)											
12.	Penyerapan Tenaga Kerja				Rencana (Orang)				Realisasi (Orang)			
					TKI		TKA		TKI		TKA	
					L	P	L	P	L	P	L	P
13.	Kewajiban				Divestasi							
					Pelatihan TKI							
					CSR							
					Kemitraan							
					Alih Teknologi							
					Pengelolaan Lingkungan							
					.....							
14.	Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha				a. Teknis							
					b. Adminstrasi							
15.	Progres Produksi Komersial				Proyek pembangunan akan selesai pada							
					Proyek mulai beroperasi pada							

### III. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

- Pengawasan lahan masih nihil
- Izin lokasi tebit : peta teknis atau kerangka dasar atau pertimbangan teknis perikanan dari KPN
- Izin lokasi telah habis, akan dilakukan kembali an. PT. Yahya

### IV. HASIL PENGAWASAN

- PT. Yahya akan mengajukan PK-KPR melalui OIR RBA

### V. DOKUMEN PENDUKUNG

**VI. REKOMENDASI**

Pemeriksa,

No.	Nama	Jabatan	Instansi	Tanda Tangan
1.	Kunto Adjie Wibowo	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	DPMPIS P	
2.	Deviani Puhyanto	Penata Perizinan Ahli Muda	DPMPIS P	
3.	Arif Martanto	Penata Perizinan Ahli Muda	DPMPIS P	
4.	Yoga Septian	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPIS P	

Mengetahui,  
Pimpinan / Penanggung  
Jawab Perusahaan

Nama : .....

Jabatan : .....

**KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
PT. ARDELIA MITRA PERKASA  
SENIN 12 JUNI 2023**





PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
( D P M P T S P )

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp./Fax. 0264-8224794  
Website : dpmptsp.purwarkartakab.go.id Email : info@dpmptsp.purwarkartakab.go.id

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)**

Nomor : BA/021/Pengdal/VI/2023

Pada hari ini, Senin tanggal 12 bulan Juni tahun 2023, yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan, telah melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko :

**I. KETERANGAN PERUSAHAAN**

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	PT. Poly Frame Global	
2.	Alamat Lokasi Proyek	Kampung Cinta Karya RT 13/05 Desa/Kelurahan <u>Citopo</u> Kecamatan <u>Bungursari</u> Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat	
3.	Luas Lahan	3.193 m <sup>2</sup> / <del>ha</del>	
4.	Nama dan Kontak Penanggung Jawab di lokasi proyek	Nama	Novi
		No. HP	081315472262

**II. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN**

1.	Nomor dan Tanggal Penerbitan Nomor Induk Berusaha	NIB	0220105161746	
		Tanggal	26 Mei 2023	
2.	Nomor Kode Proyek	20201-1915-0809-9703-530		
3.	Kegiatan Usaha (KBLI 4 digit)	Kode KBLI	2221	
		Judul KBLI	Industri Barang dari Plastik Untuk Bangunan	
4.	Bidang Usaha (KBLI 5 digit)	Kode KBLI	22210 dan 22299	
		Judul KBLI	Industri Barang dari Plastik Untuk Bangunan Industri Barang Plastik Lainnya Yaitu	
5.	Kapasitas Produksi Per Tahun	<b>Jenis</b>	<b>Kapasitas</b>	<b>Satuan</b>
		Plastic Frame	400.000	Buah Meter
6.	Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha	<b>a. Izin Lokasi / KKPR / KRK</b>		
		Nomor	056/14g-KRK/DISTAKUM/2018	
		Tanggal	01 November 2018	
		<b>b. SPPL / UKL-UPL / AMDAL</b>		
		Nomor	666/99/XI/DLH/2018	
		Tanggal	29 November 2018	

		<b>c. Izin / Persetujuan Lingkungan</b>	
		Nomor	
		Tanggal	
		<b>d. IMB / PBG</b>	
		Nomor	503/IMB. 540-DPMPTSP/2018
		Tanggal	21 November 2018
		<b>e. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)</b>	
		Nomor	
		Tanggal	
7.	Sertifikat Standar / Izin	<b>a. Sertifikat Standar</b>	
		Nomor	02201051617460001
		Tanggal	
		<b>b. Izin</b>	
		Nomor	
		Tanggal	
8.	Fasilitas Penanaman Modal	Nomor	-
		Tanggal	-
9.	Pemenuhan Standar Usaha	Pengerahan Revisi Site Plan No: 056/59-DISTARKIM/2018 Tgl: 02 November 2018	
10.	Pemenuhan Standar Produk	a. Standar	
		b. Sertifikasi	
		c. Lisensi	
		d. Pendaftaran Barang	
		e. Lain-lain	

11.	Nilai Rencana dan Realisasi Investasi ( LKPM Tahap Produksi / Operasional )											
	Komponen				Rencana (OSS)		Realisasi (LKPM)					
	a. Pembelian dan Pematangan Tanah											
	b. Bangunan / Gedung											
	c. Mesin / Peralatan Dalam Negeri											
	d. Mesin / Peralatan Impor											
	e. Investasi Lain-lain											
	Modal Tetap (a + b + c + d + e)						11.639.039.895					
	Modal Kerja											
	Total Nilai Investasi						11.639.039.895					
Kesesuaian Nilai Realisasi Investasi di Lapangan (Sesuai / Tidak Sesuai)												
12.	Penyerapan Tenaga Kerja				Rencana (Orang)		Realisasi (Orang)					
					TKI		TKA		TKI		TKA	
					L	P	L	P	L	P	L	P
									45	5	1	
									50		1	
13.	Kewajiban				Divestasi							
					<input checked="" type="checkbox"/> Pelatihan TKI							
					CSR							
					<input checked="" type="checkbox"/> Kemitraan							
					Alih Teknologi							
					Pengelolaan Lingkungan							
14.	Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha				a. Teknis							
					b. Administrasi							
15.	Progres Produksi Komersial				Proyek pembangunan akan selesai pada							
					Proyek mulai beroperasi pada							

### III. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

### IV. HASIL PENGAWASAN

- LKPM wajib dilaporkan secara berkala
- IPAT masih proses
- Sudah ada Rekam dari PDAM Kabupaten Purwakarta

### V. DOKUMEN PENDUKUNG

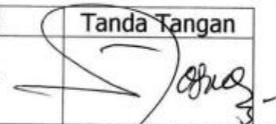
Surat Keterangan / Izin Operasional dan Melalitar Kegiatan Industri  
Nomor: 18143

Permohonan Surat Keterangan (PDAM)  
Nomor: 171 / 690 / Perundam / V / 2023  
Tanggal: 21 Mei 2023

**VI. REKOMENDASI**

- UkpM wajib dilaporkan secara berkala
- Pengajuan SHF
- Pengajuan IRT
- Migrasi dari OSS.1.1 ke OSS RBA
- Laporan UKL/UPL per Semester ke DLH

Pemeriksa,

No.	Nama	Jabatan	Instansi	Tanda Tangan
1.	Rd. Heri Lukman	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Mandiri	DPMPSP	
2.	Ahmad Soleh	Pengawas Penanaman Modal	DPMPSP	
3.	Edwin Daniil	Pengelola Pengawasan	DPMPSP	
4.	Sarabilla Arifa	Pengasas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPSP	

Mengetahui,  
Pimpinan / Penanggung  
Jawab Perusahaan



Nama : NOVI  
Jabatan : Manager

**KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
PT. POLY FRAME GLBAL  
SENIN 12 JUNI 2023**





PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
( D P M P T S P )

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp./Fax. 0264-8224794  
Website : dpmptsp.purwarkartakab.go.id Email : info@dpmptsp.purwarkartakab.go.id

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)**

Nomor : BA / 022 / Pengdal / VI / 2023

Pada hari ini, Rabu tanggal 14 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Belas Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan, telah melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko :

**I. KETERANGAN PERUSAHAAN**

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	PT. BIOAXI MEDIKA HEALTHINDO	
2.	Alamat Lokasi Proyek	Kawasan Industri Samudra Buana Texindo Blok B No.1 Desa/Kelurahan <u>Cisalada /Cisalada</u> Kecamatan <u>Jatiluhur</u> Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat /41152	
3.	Luas Lahan	2 Ha	
4.	Nama dan Kontak Penanggung Jawab di lokasi proyek	Nama	Ravi
		No. HP	0856 9736 3581

**II. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN**

1.	Nomor dan Tanggal Penerbitan Nomor Induk Berusaha	NIB	8120219180676	
		Tanggal	7 November 2018	
2.	Nomor Kode Proyek	202112-2109-1336-8857-848		
3.	Kegiatan Usaha (KBLI 4 digit)	Kode KBLI	3290	
		Judul KBLI	Industri Pengolahan Lainnya Ytdl	
4.	Bidang Usaha (KBLI 5 digit)	Kode KBLI	32904	
		Judul KBLI	Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan	
5.	Kapasitas Produksi Per Tahun	<b>Jenis</b>	<b>Kapasitas</b>	<b>Satuan</b>
		Arkes & PKRT	13.220.760	BOX
6.	Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha	<b>a. Izin Lokasi / KKPR / KRK</b>		
		Nomor	21122110213214012	
		Tanggal	21 Desember 2021	
		<b>b. SPPL / UKL-UPL / AMDAL</b>		
		Nomor	666/58/VIII/DLH/2018	
		Tanggal	16 Agustus 2018	

		<b>c. Izin / Persetujuan Lingkungan</b>	
		Nomor	188.4 / sk. 14 / DLH / 2018
		Tanggal	20 Februari 2018
		<b>d. IMB / PBG</b>	
		Nomor	503 / IMB. 579 - DRMPTSP / 2018
		Tanggal	12 Desember 2018
		<b>e. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)</b>	
		Nomor	17. 09 / SLF - TAB6 / DISTARKIM / VII / 2021
		Tanggal	9 JUL 2021
7.	Sertifikat Standar / Izin	<b>a. Sertifikat Standar</b>	
		Nomor	81202191806760004
		Tanggal	21 Desember 2021
		<b>b. Izin</b>	
		Nomor	
		Tanggal	
8.	Fasilitas Penanaman Modal	Nomor	
		Tanggal	
9.	Pemenuhan Standar Usaha		
10.	Pemenuhan Standar Produk	a. Standar	
		b. Sertifikasi	Dirjen kefarmasian dan Alat kesehatan kementerian kesehatan RI tentang
		No.FK.01.02/VI/102-e/2019	21 April 2019
		c. Lisensi	Sertifikat Produksi Alat Kesehatan.
		d. Pendaftaran Barang	
		e. Lain-lain	

11.	Nilai Rencana dan Realisasi Investasi											
	Komponen				Rencana (OSS)		Realisasi (LKPM)					
	a. Pembelian dan Pematangan Tanah											
	b. Bangunan / Gedung											
	c. Mesin / Peralatan Dalam Negeri											
	d. Mesin / Peralatan Impor											
	e. Investasi Lain-lain											
	Modal Tetap (a + b + c + d + e)						288.524.223.742					
	Modal Kerja						1.157.232.143					
	Total Nilai Investasi						289.681.455.885					
Kesesuaian Nilai Realisasi Investasi di Lapangan (Sesuai / Tidak Sesuai)												
12.	Penyerapan Tenaga Kerja				Rencana (Orang)		Realisasi (Orang)					
					TKI		TKA		TKI		TKA	
					L	P	L	P	L	P	L	P
									35	32	-	-
									67			
13.	Kewajiban				Divestasi							
					Pelatihan TKI							
					CSR							
					Kemitraan							
					Alih Teknologi							
					Pengelolaan Lingkungan							
					.....							
14.	Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha				a. Teknis							
					b. Adminstrasi							
15.	Progres Produksi Komersial				Proyek pembangunan akan selesai pada							
					Proyek mulai beroperasi pada							

### III. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

1. Kesulitan dalam melaporkan LKPM karena dari bagian keuangan bio axi terlambat melaporkan

### IV. HASIL PENGAWASAN

1. Belum melaporkan LKPM Triwulan I Tahun 2023
2. Pelaporan LKPM akan di akumulasikan di triwulan II
3. Perizinan dasar sudah lengkap.

### V. DOKUMEN PENDUKUNG

**VI. REKOMENDASI**

1. Segera melaporkan LKPM akumulasi triwulan I dan II Tahun 2023
2. Untuk melaporkan LKPM per KBLI
3. Untuk merevisi Luas Lahan di Persetujuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dari 50 M<sup>2</sup> menjadi 2 Ha.
4. Untuk permasalahan LKPM dan PKKPR agar berkoordinasi ke MPP Bale M dukara

Pemeriksa,

No.	Nama	Jabatan	Instansi	Tanda Tangan
1.	Hesti Luluman	Ahli Madya	DPMP 180	
2.	LINGGA KENZANA	AHLI MUDA	DPMP 180	
3.	Ahmad Soleh	Pengawas PM	DPMP 180	
4.	Edwin Damii	Parabola		

Mengetahui,  
Pimpinan / Penanggung  
Jawab Perusahaan



Nama : Sarah Fauziah  
Jabatan : As. Manager HRD & GA

**KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
PT. BIOAXI MEDIKA HEALTHINDO  
RABU 14 JUNI 2023**





PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
( D P M P T S P )

Jl. Veteran No. 139 Purwokarta 41115 Telp./Fax. 0264-8224794  
Website : dpmpptsp.purwarkartakab.go.id Email : info@dpmpptsp.purwarkartakab.go.id

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)**

Nomor : BA/024/Pengdal/VI/2023

Pada hari ini, Jumat tanggal 16 bulan Juni tahun ....., yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan, telah melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko :

**I. KETERANGAN PERUSAHAAN**

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	PT. PLN Nusantara Power
2.	Alamat Lokasi Proyek	PLTA Cirata 8x126 MW Desa/Kelurahan <u>Cadassari</u> Kecamatan <u>Tegalwaru</u> Kabupaten Purwokarta, Provinsi Jawa Barat
3.	Luas Lahan	7.800 m <sup>2</sup> /Ha 6.200 Ha → Genangan
4.	Nama dan Kontak Penanggung Jawab di lokasi proyek	Nama <u>Elpin Kurniawan</u> No. HP <u>0812 914 90316</u>

**II. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN**

1.	Nomor dan Tanggal Penerbitan Nomor Induk Berusaha	NIB	8120002971007	
		Tanggal	31 Mei 2023	
2.	Nomor Kode Proyek	202304-1314-4850-0318-154		
3.	Kegiatan Usaha (KBLI 4 digit)	Kode KBLI	3511	
		Judul KBLI	Pengeediaan Tenaga Listrik	
4.	Bidang Usaha (KBLI 5 digit)	Kode KBLI	35111	
		Judul KBLI	Pembangkitan Tenaga Listrik	
5.	Kapasitas Produksi Per Tahun	<b>Jenis</b>	<b>Kapasitas</b>	<b>Satuan</b>
		PLTA 8x126	1.008	MW
6.	Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha	<b>a. Izin Lokasi / KKPR / KRK</b>		
		Nomor	14022210213214012	
		Tanggal	29 Desember 2021	
		<b>b. SPPL / UKL-UPL / AMDAL</b>		
		Nomor	3231.A 0115/SJ.R/1997	
		Tanggal	29 Agustus 1997	

		<b>c. Izin / Persetujuan Lingkungan</b>	
		Nomor	660/19/11.1-02-0/DMPPTP/2020
		Tanggal	03 November 2020
		<b>d. IMB / PBG</b>	
		Nomor	602/IMB-227/DMPPTP/2020
		Tanggal	
		<b>e. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)</b>	
		Nomor	
		Tanggal	
7.	Sertifikat Standar / Izin	<b>a. Sertifikat Standar</b>	
		Nomor	
		Tanggal	
		<b>b. Izin UPTLU</b>	
		Nomor	B1200029710070018
		Tanggal	08 April 2022 (13 Mei -> PJB)
8.	Fasilitas Penanaman Modal	Nomor	
		Tanggal	
9.	Pemenuhan Standar Usaha	Izin UPTL Tgl: 21 Desember 2021	
10.	Pemenuhan Standar Produk	a. Standar	
		b. Sertifikasi	
		c. Lisensi	
		d. Pendaftaran Barang	
		e. Lain-lain	

11.	Nilai Rencana dan Realisasi Investasi											
	Komponen				Rencana (OSS)		Realisasi (LKPM)					
	a. Pembelian dan Pematangan Tanah											
	b. Bangunan / Gedung											
	c. Mesin / Peralatan Dalam Negeri											
	d. Mesin / Peralatan Impor											
	e. Investasi Lain-lain											
	Modal Tetap (a + b + c + d + e)											
	Modal Kerja						476.483.644.484					
	Total Nilai Investasi				26.684.966.109.672		476.483.644.484					
	Kesesuaian Nilai Realisasi Investasi di Lapangan (Sesuai / <del>Tidak Sesuai</del> )											
12.	Penyerapan Tenaga Kerja				Rencana (Orang)		Realisasi (Orang)					
					TKI		TKA		TKI		TKA	
					L	P	L	P	L	P	L	P
									143	17		
					142				160			
									160			
13.	Kewajiban				Divestasi							
					✓ Pelatihan TKI							
					✓ CSR							
					✓ Kemitraan → Karang Taruna, Pustresmas, TK							
					Alih Teknologi							
					✓ Pengelolaan Lingkungan							
					.....							
14.	Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha				a. Teknis		11,31					
					b. Adminstrasi		16,04					
					Jumlah: 27,35 (Kurang Baik)							
15.	Progres Produksi Komersial				Proyek pembangunan akan selesai pada							
					Proyek mulai beroperasi pada							

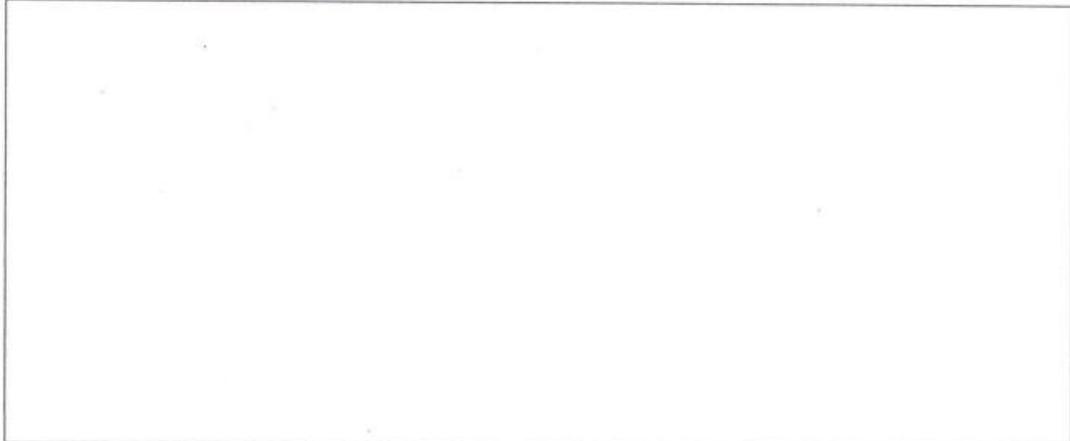
### III. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

- Adanya holding subholding PT. PLN Persero yang mengakibatkan terjadinya perubahan nama yang awalnya PT. Pembangkitan Jawa Bali menjadi PT. PLN Nusantara Power dan pengalihan aset dari PT. PLN Persero ke PT. PLN Nusantara Power dan telah berkoordinasi dengan BkPM dan disarankan untuk menginput KBLI 35111

### IV. HASIL PENGAWASAN

- Untuk pengurusan Perizinan atas nama PT. PLN Nusantara Power masih dalam proses pengajuan di OSS
- CSR yang sudah dilaksanakan sudah dianggarkan setiap tahun dibagi menjadi 4 bidang yaitu:
  - a. Capacity building dalam bentuk pelatihan atau penyuluhan kepada masyarakat
  - b. Donasi mendukung pencegahan Covid 19 PHBS
  - c. Infrastruktur : Sarana air, TK Binaan PBJ, hari besar
  - d. Empowerment : Berkerjasama dengan masyarakat sekitar dalam bentuk kerjasama
- Kerjasama yang dilaksanakan oleh PT. PLN Nusantara dalam bidang jasa keamanan dengan POLDA JABAR dan kerjasama dengan Dinas Perhubungan terkait Penerangan Jalan Umum dalam bentuk MoU

### V. DOKUMEN PENDUKUNG



**VI. REKOMENDASI**

- Perusahaan agar berkoordinasi dengan Direktorat Teknologi Informasi Kementerian Investasi / Bkpm terkait permasalahan sistem OSS untuk rencana penghapusan KBLI
- Perusahaan agar tetap melaporkan UKPM untuk semua KBLI yang dimiliki termasuk yang akan dihapuskan dan mohon menyampaikan kronologis permasalahan duplikasi kegiatan usaha yang tercantum dalam data perizinan di Sistem OSS

Pemeriksa,

No.	Nama	Jabatan	Instansi	Tanda Tangan
1.	LINBEA K	PP AHLI MUDA	DAMPTSP	
2.	Sansabilka Arifa	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPNPTSP Kab. Purwakarta	
3.	Edwin Danil	Pengelola Pengawasan	DPNPTSP Kab. Purwakarta	
4.	Arrinal Legia Sherman, S. AB	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	DPNPTSP Provinsi Jawa Barat	
5.	Elis Maryani, A.Md	Pengolah Data	DPNPTSP Provinsi Jawa Barat	
6.	Dian Purnamasari	Pengadministrasi Umum	DPNPTSP Provinsi Jawa Barat	
7.	Alfiano Luky Wibowo	Tenaga Pendamping Fasilitas Penanaman Modal	DPNPTSP Provinsi Jawa Barat	

Mengetahui,  
Pimpinan / Penanggung  
Jawab Perusahaan



Nama : Elpin Korniawan  
Jabatan : Officer Permission

**KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
PT. PLN NUSANTARA POWER  
JUMAT 16 JUNI 2023**





PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwokarta 41115 Telp./Fax. 0264-8224794  
Website : dpmptsp.purwarkartakab.go.id Email : info@dpmptsp.purwarkartakab.go.id

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)**

Nomor : BA / 026 / Pengdal / VI / 2023

Pada hari ini, Jum'at tanggal 15 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Ratus Tiga yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan, telah melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko :

**I. KETERANGAN PERUSAHAAN**

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	PT. MITSUBA AUTOMOTIVE PART INDONESIA	
2.	Alamat Lokasi Proyek	Kawasan Industri Kota Bukit Indah Blok DIII No.3 Desa/Kelurahan <u>Dangdeur / Dangdeur</u> Kecamatan <u>Bungursari</u> Kabupaten Purwokarta, Provinsi Jawa Barat	
3.	Luas Lahan	& m <sup>2</sup> /Ha	
4.	Nama dan Kontak Penanggung Jawab di lokasi proyek	Nama	Hamonangan L. Siboro
		No. HP	081395117984

**II. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN**

1.	Nomor dan Tanggal Penerbitan Nomor Induk Berusaha	NIB	812.0000962953	
		Tanggal	25 September 2018	
2.	Nomor Kode Proyek	201912-3016-5940-738		
3.	Kegiatan Usaha (KBLI 4 digit)	Kode KBLI	2930	
		Judul KBLI	Industri suku Cadang dan Aksesoris kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih	
4.	Bidang Usaha (KBLI 5 digit)	Kode KBLI	29300	
		Judul KBLI	Industri suku Cadang dan Aksesoris kendaraan Bermotor Roda empat atau lebih (Klasifikasi Risiko Menengah Tinggi)	
5.	Kapasitas Produksi Per Tahun	<b>Jenis</b>	<b>Kapasitas</b>	<b>Satuan</b>
		Power Sliding Door	11.400.000	Unit
6.	Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha	<b>a. Izin Lokasi / KKPR / KRK</b>		
		Nomor	23112210213214041	
		Tanggal	15 November 2022	
		<b>b. SPPL / UKL-UPL / AMDAL</b>		
		Nomor	666/93/x1/DLH/2018	
		Tanggal	28 November 2018	

		<b>c. Izin / Persetujuan Lingkungan</b>	
		Nomor	8120000962953
		Tanggal	28 NOVEMBER 2018
		<b>d. IMB / PBG</b>	
		Nomor	533/IMB.494-DPMPTSP/2018
		Tanggal	25 OKTOBER 2018
		<b>e. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)</b>	
		Nomor	10.05/SLF-TABG/DISTARKIM/V/2021
		Tanggal	17 Maret 2021
7.	Sertifikat Standar / Izin	<b>a. Sertifikat Standar</b>	
		Nomor	
		Tanggal	
		<b>b. Izin</b>	
		Nomor	
		Tanggal	
8.	Fasilitas Penanaman Modal	Nomor	
		Tanggal	
9.	Pemenuhan Standar Usaha	-	
10.	Pemenuhan Standar Produk	a. Standar	-
		b. Sertifikasi	-
		c. Lisensi	-
		d. Pendaftaran Barang	-
		e. Lain-lain	-

11. Nilai Rencana dan Realisasi Investasi												
Komponen					Rencana (OSS)			Realisasi (LKPM)				
a. Pembelian dan Pematangan Tanah												
b. Bangunan / Gedung												
c. Mesin / Peralatan Dalam Negeri												
d. Mesin / Peralatan Impor												
e. Investasi Lain-lain												
Modal Tetap (a + b + c + d + e)								1.446.764.644				
Modal Kerja												
Total Nilai Investasi								1.446.764.644				
Kesesuaian Nilai Realisasi Investasi di Lapangan (Sesuai / <del>Tidak Sesuai</del> )												
12. Penyerapan Tenaga Kerja												
					Rencana (Orang)				Realisasi (Orang)			
					TKI		TKA		TKI		TKA	
					L	P	L	P	L	P	L	P
									131	117		
					240				248		3	
					240 Orang				251 Orang			
13. Kewajiban												
					-	Divestasi						
					✓	Pelatihan TKI : <i>Kaizen double check</i>						
					✓	CSR						
					✓	Kemitraan						
					✓	Alih Teknologi						
					✓	Pengelolaan Lingkungan						
						.....						
14. Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha												
Tingkat Kepatuhan : 48,63 (baik)					a. Teknis		15 (berdasarkan data pada oss)					
					b. Adminstrasi		33,63 (berdasarkan data pada oss)					
15. Progres Produksi Komersial												
					Proyek pembangunan akan selesai pada				-			
					Proyek mulai beroperasi pada				-			

### III. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

1. Pada tahun 2022 periode triwulan IV, sering kali terjadi aliran listrik terputus sehingga aktivitas / kegiatan utilitas menjadi terganggu.

### IV. HASIL PENGAWASAN

1. Laporan terakhir yang dilaporkan pada LKPM s.d Triwulan I th. 2023 patuh dan dilaporkan secara rutin dan berkala
2. PT. Mitsuba Automotive Part Indonesia merupakan perorangan dari PT. Jideco Indonesia sejak tahun 2014, dan memiliki izin prinsip PMA dari BKPM No : 1393/1/IP/PMA/2016 Tanggal 25 Mei 2016
3. CSR yang telah dilakukan : donasi kepada anak yatim, pembuatan penampungan air bersih, edukasi sanitasi lingkungan, pembinaan pos yandu, edukasi kesehatan balita dan donasi gempa Cianjur dengan total CSR s.d tahun 2022 : Rp. 13.613.775,-
4. Pelatihan rutin bagi TKI melalui alih teknologi dari TKA :
  - Kaizen double check
  - Arrangement new project

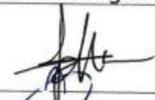
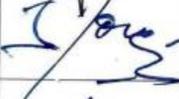
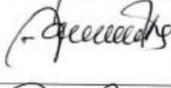
### V. DOKUMEN PENDUKUNG

- Dokumen UKL-UPL tahun 2018
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
- PKKPTL
- IMB
- SS
- SLF

**VI. REKOMENDASI**

1. Agar melakukan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian mengenai pemenuhan persyaratan sertifikat standar terbaru nomor : 81200009629530001 Tanggal 28 November 2022
2. Agar selalu menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) untuk seluruh KBLI/ seluruh proyek secara periodik dan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui OSS-RPA, dengan status laporan "Disetujui oleh BKPM"
3. Harus mengupdate ulang sertifikat standar yang sudah tak berlaku.

Pemeriksa,

No.	Nama	Jabatan	Instansi	Tanda Tangan
1.	Dindin Jamaludin	JF- Analis Hukum Madya	DPMPITSP Jabar	
2.	Pd. Heri Lukman	Analisis kebijakan Ahli Madya	DPMPITSP KAB. FWK	
3.	Dewi Susanti	Pengawas PM	DPMPITSP	
4.	Ahmad Saleh	Pengawas PM	"	
5.	Aep Saepuloh	Pengusaha Berkarya Berkarya Hasil Pengusaha	DPMPITSP Prov. Jabar	
6.	Rina Lestari	Pengadministrasian Perizinan	DPMPITSP Prov. Jabar	
7.	Isah Holiwah	Pengadministrasian Hukum	DPMPITSP Prov. Jabar	

Mengetahui,  
Pimpinan / Penanggung  
Jawab Perusahaan


Nama : Hamonangan  
Jabatan : Stat. GA

**KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
PT. MITSUBA AUTOMOTIVE PARTS INDONESIA  
JUMAT 16 JUNI 2023**

